

**KONFLIK, NEGOSIASI DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN:
PELAJARAN BERHARGA DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
REKONSTRUKSI PASAR INPRES I, II, III DAN IV KOTA PADANG
PASCAGEMPA 30 SEPTEMBER 2009**

Wayu Eko Yudiatmaja, Dwi Kristanti

*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau*

UPBJJ-UT Padang

E-mail: wayuguci@gmail.com

Abstract

This article analyzes the conflict, negotiations and policy changes in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang postearthquake 30 September 2009. This research would like to question how the negotiations and policy changes in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang? The central themes of this research are democratic policies, negotiations and policy changes, so that the concepts and theories that are used to analyze the problem of this research is the concept and theory related to deliberative public policy, advocacy coalition framework and policy changes. This research was conducted using phenomenological approach in order to explain and interpret the thoughts and actions of the actors involved in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang. This study concludes that the process of democratic policies in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang was patterned after deliberation and negotiation policies, in which each actor can negotiate their interests. After the negotiation, Padang City Government began to soften and change the policies and programs of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV according to the desired model by sword.

Key words: Democracy, negotiation, coalition advocacy framework, policy change

Latar Belakang

Tulisan ini menganalisis demokrasi, negosiasi dan perubahan kebijakan dengan menganalisis kasus kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009. Tema ini penting untuk dikaji dilihat dari perspektif teoritis dan empiris. Secara teoritis, Harold D. Lasswell mengungkapkan bahwa orientasi kebijakan publik adalah menciptakan demokratisasi. Kebijakan publik merupakan proses politik yang harus dilakukan secara demokratis melalui pelibatan atau partisipasi publik (Dryzek, 1989; Dyzek dan Torgerson, 1993; deLeon, 1990; deLeon,

1995; Wagle, 2000; Farr, Hacker dan Kazee, 2006; Brunner, 2008). Keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam setiap proses kebijakan publik karena publik adalah penerima manfaat (*beneficiaries*) kebijakan, sehingga publik harus mengetahui substansi kebijakan dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik.

Kegagalan kebijakan publik seringkali terjadi karena kebijakan tersebut dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi publik. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan menjadi penting karena partisipasi merupakan bagian yang *inherent* dari perwujudan demokratisasi (Hupe dan Edwards, 2012). Kebijakan publik seharusnya dirumuskan dengan mekanisme yang demokratis melalui keterlibatan dan diskusi antaraktor. Pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dalam perumusan kebijakan, pada akhirnya akan berujung pada kegagalan implementasi kebijakan itu.

Dalam studi kebijakan publik, terdapat pendekatan demokrasi dalam kebijakan publik. Pendekatan ini mencoba menutupi kelemahan pendekatan kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak *scholars* kebijakan publik, seperti Dryzek (1989), Dryzek dan Torgerson (1993), deLeon (1990), deLeon (1992), deLeon (1995), deLeon (1997), Wagle (2000), Roberts (2004), Fung (2006), Farr, Hacker dan Kazee (2006), Brunner (2008), Bryer (2010) menganjurkan pendekatan demokrasi dalam kebijakan publik agar kebijakan tersebut bisa diterima oleh publik (*legitimate*). Lebih lanjut, deLeon dan deLeon (2002: 483) mengusulkan pendekatan demokrasi (*democratic approach*) dalam implementasi kebijakan. Menurut deLeon dan deLeon, selama ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu mengalami kegagalan karena lupa melibatkan pihak-pihak yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) dari kebijakan itu. Oleh karena itu, menurut deLeon dan deLeon mutlak diperlukan partisipasi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan (*policy formulation deliberations*). Sedangkan, Ansell dan Gash (2002: 543) menyebut proses ini dengan *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash dalam perumusan kebijakan yang kolaboratif, seluruh *stakeholders* (*multiple stakeholders*) dilibatkan dalam forum bersama dengan pemerintah sebelum menentukan kebijakan.

Dari sisi empiris, pascagempa 30 September 2009, Pemerintah Kota Padang berusaha merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang yang rusak akibat

gempa. Pasar Inpres I sudah selesai direkonstruksi, tetapi pedagang menolak untuk pindah. Selanjutnya, pedagang menolak rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Pedagang bersikukuh bahwa pasar tersebut cukup direhabilitasi saja, bukan direkonstruksi. Pedagang melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan tetap berjualan di Pasar Inpres II, III dan IV.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kota Padang dan para pedagang melakukan negosiasi untuk mencari titik temu penyelesaian masalah penempatan pedagang Pasar Inpres I di Pasar Inpres I yang telah selesai direkonstruksi dan masalah rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Secara formal, proses negosiasi tersebut sudah dimulai sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Masalah dan Percepatan Pembangunan Kembali Pasar Raya Padang pada tanggal 13 April 2011. Namun, titik terang menuju penyelesaian masalah ini baru mencapai klimaksnya setelah penandatanganan kesepakatan penyelesaian sengketa rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang pascagempa 2009 antara Pemerintah Kota Padang dengan Pedagang Pasar Raya Padang pada tanggal 8 November 2011 di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta. Di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang dikejar target untuk segera melakukan percepatan penyelesaian masalah Pasar Inpres I, II, III dan IV karena dana rekonstruksi untuk Pasar Inpres II, III dan IV sudah cair dan tinggal digunakan, proses ini terbilang lama dan alot. Oleh karena itu, penelitian ini sebenarnya ingin menjawab dua pertanyaan besar berikut ini:

- a) Bagaimana negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009?
- b) Bagaimana model perubahan kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009 pascanegosiasi antara Pemerintah Kota Padang dan pedagang?

Telaah Literatur

1. Konflik dan Negosiasi Kebijakan

Secara harfiah konflik berarti percekocokan, perselisihan atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan (Francis, 2006: 7). Menurut Pruitt dan Rubin (2004: 9-10) konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu

kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dengan demikian, konflik dapat dipahami sebagai perbedaan persepsi, aspirasi, keinginan, kepentingan diantara dua pihak atau lebih dan dimanifestasikan dalam berbagai aksi.

Konflik biasanya dilihat secara lebih luas, melibatkan banyak orang, lebih dalam dari isu yang nampak di permukaan dan menyangkut pertanyaan mengenai nilai, identitas, ketakutan atau kebutuhan, dan berlangsung secara sistemik (Moffitt dan Bordone, 2005: 2-3). Konflik dapat dimaknai sebagai keadaan dimana heterogenitas kepentingan, nilai dan kepercayaan sebagai bentuk dari dinamika sosial muncul ke permukaan dan berhadapan dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh kelompok lain (Carpenter dan Kennedy, 1988: 6). Dalam konsep ini, konflik terjadi karena adanya benturan nilai-nilai dan kepentingan dalam komunitas dan suatu komunitas berusaha menghalangi komunitas lain untuk menyakini dan mengembangkan nilai-nilai dan kepentingan yang diinginkannya.

Konflik dapat diklasifikasikan atas lima jenis konflik, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, kombinasi konflik vertikal-horizontal, konflik elit dan konflik separatis. Dalam perspektif kebijakan publik, pada dasarnya terdapat tiga pendekatan untuk memahami mengapa konflik hadir dalam kebijakan publik. *Pertama*, pendekatan demokratis, menurut pendekatan ini kebijakan publik tidak dapat menghasilkan kebaikan bersama (*common good*). Arah kebijakan yang disarankan untuk direkomendasikan dan diputuskan tidak memberikan manfaat bagi mayoritas publik sehingga timbul resistensi dari masyarakat. Kebijakan tidak mampu memberikan manfaat kepada publik secara luas dapat terjadi karena tiga faktor (Dwidjowijoto, 2008: 272):

- a) Kebijakan dipolitisasi dan dimonopoli oleh elit atau sekelompok elit sehingga kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang.
- b) Kebijakan bias teknokratik karena dirumuskan oleh analis dan pembuat kebijakan (*policy maker*) yang bekerja secara positivistik. Hal ini semakin diperparah dengan keterkaitan para analis dan pembuat kebijakan dengan elit atau pemangku kebijakan, baik keterkaitan secara politik maupun ekonomi.
- c) Adanya keterbatasan di bidang keilmuan kebijakan publik. Banyak analis kebijakan publik yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau kecakapan di

bidang kebijakan publik sehingga mereka tidak cukup profesional untuk merumuskan kebijakan secara baik.

Kedua, pendekatan *output*, kebijakan seringkali diharapkan untuk memperoleh hasil yang tertinggi dengan risiko atau tingkat kegagalan yang paling rendah. Pembeneran dari pendekatan ini adalah bahwa kebijakan publik harus berhasil karena asumsi yang dikembangkan, kegagalan kebijakan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama. *Ketiga*, pendekatan deliberatif, memberikan arah kebijakan dengan menetapkan kebijakan yang paling mungkin diterima oleh berbagai pihak.

Negosiasi merupakan salah satu proses dasar dalam perumusan kebijakan publik (Dahl, 1959). Salah satu fungsi kebijakan publik yaitu mengatur tentang alokasi sumber daya material dan nonmaterial kepada kelompok sasaran. Sumber daya itu akan menjadi rebutan bagi setiap orang atau kelompok yang membutuhkannya. Rebutan-rebutan tadi dapat menimbulkan letupan-letupan yang berpotensi menjadi konflik. Dalam kondisi yang ekstrem, konflik bisa membawa bencana dan pertumpahan darah. Namun, dalam situasi yang moderat, konflik hanya menghasilkan gesekan-gesekan antarkelompok kepentingan. Konflik yang ekstrem tentu saja lebih sulit untuk dicairkan dibandingkan dengan konflik yang moderat.

6

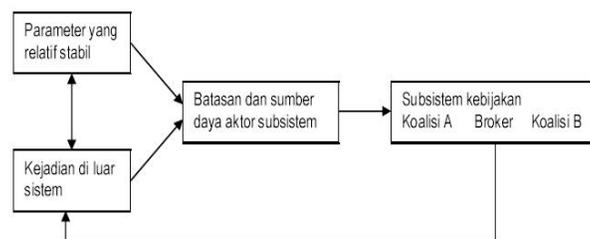
2. Advocacy Coalition Framework

Advocacy Coalition Framework (ACF) merupakan suatu konsep perubahan kebijakan dalam subsistem kebijakan yang dilakukan oleh aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan tersebut (Sabatier, 1987; Sabatier, 1988; Sabatier, 1991; Jenkins-Smith dan Sabatier, 1994; Sabatier, 1998; Weible, 2007; Elgin dan Weible, 2013). ACF adalah kerangka konseptual untuk menganalisis koalisi yang dibangun oleh aktor-aktor yang terkait dengan kebijakan untuk melakukan advokasi guna memperjuangkan kepentingannya masing-masing. ACF.

Menurut Parsons (2003) subsistem kebijakan terdiri dari semua pihak yang memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi dan evaluasi ide kebijakan. Dalam perspektif teori ACF, kebijakan dibuat berdasarkan advokasi koalisi yang dilakukan oleh aktor-aktor atau *stakeholder* yang terlibat. Aktor-aktor tersebut saling berkoalisi atas dasar keyakinan (*beliefs*) yang sama. Keyakinan inilah yang menjadi dasar bagi setiap

koalisi untuk mempertahankan idenya, memperjuangkannya atau merubah ide kebijakan aktor lain.

Sabatier (1988; 1991) mengkonseptualisasikan proses kebijakan dalam konsep subsistem kebijakan. Sabatier mengungkapkan bahwa proses perubahan kebijakan publik terdiri dari subsistem internal dan eksternal. Subsistem internal terdiri dari atribusi dasar masalah kebijakan, distribusi sumber daya, nilai-nilai dasar dan struktur sosial, dan aturan dasar. Sedangkan subsistem eksternal terdiri dari kondisi sosio-ekonomi, koalisi pemerintah, dan dampak dari kebijakan lain. Namun, setiap aktor memiliki sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dan keterbatasan dana. Hal ini yang membuat broker dan aktor kebijakan membentuk koalisi agar *output* dan *impact* kebijakan dapat mengakomodasi kepentingannya (lihat gambar 1).



Gambar 1. Model Perubahan Kebijakan (Sabatier, 1988: 132; 1991: 154)

Kebijakan bisa berubah disebabkan oleh konflik sosial yang terjadi di masyarakat (Bennett dan Howlett, 1992). Konflik terjadi karena setiap koalisi gagal mencapai stabilitas kebijakan (*policy stability*). Akibatnya, desain kebijakan mengalami pergeseran atau perubahan dari desain awal kebijakan yang sudah diambil oleh *policy maker*. Teori ACF dipakai untuk menganalisis koalisi aktor dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang ada, seperti wawancara, observasi partisipasi dan metode-metode visual (Denzin dan Lincoln, 1998: 2). Penelitian ini berusaha untuk menemukannya dan menganalisis negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV di Kota Padang melalui interpretasi secara kualitatif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan mengapa para pedagang menolak rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV dan bagaimana demokrasi berlangsung dalam proses negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. Seperti penelitian kualitatif pada umumnya maka fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan ditampilkan secara natural sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi terkait dengan negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang.

Pembahasan

1. Negosiasi Kebijakan dan Program

Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang

Sejak awal, kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV dirumuskan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Kemudian, Pemerintah Kota Padang tetap menggunakan pendekatan kekuasaan. Bahkan, Pemerintah Kota Padang menggunakan cara-cara kekerasan dan kekuatan paksaan (*coersive*) dalam pembongkaran Pasar Inpres II, III dan IV. Hal ini menimbulkan resistensi dan perlawanan dari para pedagang. Akibatnya, proses negosiasi kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan IV memakan waktu yang lama.

Pemerintah Kota Padang bernegosiasi dengan para pedagang untuk mencari stabilitas kebijakan. Aktor yang terlibat dalam negosiasi ini adalah pedagang yang diwakili oleh Forum Warga Kota (FWK) Padang, kemudian diwakili oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Perwakilan Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana hasil studi Delgado (2011), koalisi antaraktor dalam advokasi kebijakan bersifat dinamis. Koalisi yang dibangun oleh pedagang dengan FWK dan PBHI juga bersifat dinamis. Pedagang keluar dari FWK karena ada *conflict of interest* antara pedagang dan elit-elit FWK. Bersama PBHI pedagang membangun koalisi dan melakukan advokasi kebijakan dengan Pemerintah Kota Padang.

Pedagang membangun koalisi dengan FWK dan PBHI tanpa paksaan atau desakan dari pihak lain. Pedagang sadar bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan advokasi dari pihak ketiga. Dalam hal ini, pedagang memiliki keyakinan (*beliefs*) bahwa FWK dan PBHI memiliki sumber daya informasi, pengetahuan dan kapasitas untuk memperjuangkan kepentingannya. FWK dan PBHI pun secara sukarela membantu para pedagang dan mengadvokasi kepentingan pedagang kepada Pemerintah Kota Padang dalam setiap proses negosiasi.

Pemerintah Kota Padang bersedia membuka dialog dengan para pedagang karena dana untuk rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp64,5 miliar. Sementara, limit waktu penggunaan tersebut sudah hampir habis. Pemerintah Kota Padang bernegosiasi dengan FWK dan PBHI tentang penempatan kembali pedagang Pasar Inpres I di Pasar Inpres I yang sudah selesai di bangun dan masalah rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV.

Dari data lapangan, terungkap bahwa beberapa kali Pemerintah Kota Padang bersama FWK dan PBHI melakukan negosiasi untuk mencari titik temu. Namun, semua negosiasi tersebut berujung *deadlock* karena masing-masing pihak bersikukuh dengan keinginannya. Pemerintah Kota Padang bersikukuh bahwa pedagang harus membeli kios dan los di Pasar Inpres I sesuai dengan harga yang telah dipatoknya, sedangkan FWK dan PBHI meminta supaya kios dan los tersebut diberikan secara gratis kepada para pedagang. Pemerintah Kota Padang bersikeras bahwa Pasar Inpres II, III dan IV direkonstruksi, sementara pedagang menginginkan agar direhabilitasi saja karena pedagang khawatir tidak mampu membeli kios dan los di pasar tersebut.

Keinginan tersebut tidak bisa dijembatani, hingga akhirnya Pemerintah Kota Padang melakukan aksi pembongkaran Pasar Inpres II, III dan IV secara sepihak pada Hari Raya Idul Fitri 1432 H tanggal 31 Agustus 2011. Pedagang yang tidak terima dengan tindakan Pemerintah Kota Padang mencoba menghalangi dan melakukan perlawanan. Pedagang berhasil karena Pemerintah Kota Padang tidak dapat membongkar pasar itu. Namun, bentrokan tersebut menimbulkan korban luka-luka dari pihak pedagang.

Insiden ini menjadi senjata bagi PBHI untuk menekan Pemerintah Kota Padang dengan mengekspose insiden di hari raya tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

PBHI melaporkan tindakan sewenang-wenang Pemerintah Kota Padang kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Sedangkan pejabat Pemerintah Kota Padang yang melakukan pemukulan terhadap pedagang pada saat insiden itu terjadi dilaporkan ke Polda Sumatera Barat. Akhirnya Pemerintah Kota Padang mulai melunak dan memenuhi permintaan pedagang.

Dalam studi ACF aktor yang memenangkan perubahan kebijakan adalah koalisi yang paling kuat (*powerful*) dan kompetitif (Mintrom dan Vergari, 1996; Sato, 1999; Chanley Jr, 2005; Weible, 2007; Hayes 2008; Knox, 2010; Elgin dan Weible, 2013; Leifeld 2013). Namun, pada kasus rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang, Pemerintah Kota Padang mengubah kebijakan dan program rekonstruksi bukan karena lemah, tetapi karena sudah terdesak.

2. Model Perubahan Kebijakan dan Program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang

Pascabentrokan tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Padang baru mulai melunak dan memenuhi semua tuntutan pedagang. Setelah proses mediasi yang diprakarsai oleh Komnas HAM RI. Setelah beberapa kali gagal menemukan kata sepakat dalam proses mediasi, akhirnya pedagang dan Pemerintah Kota Padang menyepakati penyelesaian sengketa kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang Pascagempa 2009. Adapun, inti dari kesepakatan itu adalah:

- 1) Pedagang sepakat agar Pasar Inpres II, III dan IV direkonstruksi.
- 2) Pada saat Pasar Inpres II, III dan IV direkonstruksi, Pemerintah Kota Padang harus:
 - a) Menyediakan kios penampungan yang layak sesuai dengan jumlah pedagang.
 - b) Menempatkan pedagang ke kios penampungan tanpa dipungut biaya apapun.
 - c) Memindahkan semua pedagang sebelum pemagaran dan pembongkaran Pasar Inpres II, III dan IV.
 - d) Desain bangunan Pasar Inpres II, III dan IV harus sesuai dengan kebutuhan pedagang.
 - e) Sebelum desain bangunan diputuskan, Pemerintah Kota Padang wajib memusyawarakannya dengan pedagang.

- 3) Setelah proses rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV selesai, Pemerintah Kota Padang harus:
 - a) Menempatkan kembali pedagang tanpa memungut biaya apapun, kecuali retribusi.
 - b) Membatasi kepemilikan Kartu Kuning dan Surat Penunjukan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.
- 4) Khusus untuk pedagang Pasar Inpres I, mereka mendapatkan fasilitas sebagai berikut:
 - a) Pedagang Inpres I akan ditempatkan kembali di Pasar Inpres I yang telah selesai dibangun.
 - b) Pedagang Pasar Inpres I yang sebelumnya menempati lantai 1, ditempatkan kembali di lantai 1.
 - c) Terkait dengan gedung Pasar Inpres I lantai 2 sudah ditempati oleh pedagang ayam, maka pedagang Pasar Inpres I lantai 2 ditempatkan di Pasar Inpres II lantai 2, menggantikan pedagang ayam.

Simpulan dan Saran

Negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang berlangsung lama karena alotnya perdebatan antara Pemerintah Kota Padang dan pedagang. Tulisan ini ingin menyimpulkan dua hal, *pertama*, pedagang membangun koalisi bersama FWK dan PBHI guna mendapatkan dukungan advokasi kebijakan. Koalisi tersebut sukses memaksa Pemerintah Kota Padang mengubah kebijakannya. *Kedua*, Pemerintah Kota Padang mengubah kebijakan dan program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang karena sudah semakin terdesak karena batas waktu penggunaan anggaran sudah semakin sempit dan insiden pemukulan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang saat bentrokan pembongkaran Pasar Inpres II, III dan IV secara sepihak pada Hari Raya Idul Fitri 1432 H tanggal 31 Agustus 2011.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang ingin disarankan kepada Pemerintah Kota Padang, diantaranya:

- a) Pemerintah Kota Padang harus memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dengan perwakilan pedagang di Komnas HAM RI. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Padang wajib menyerahkan kios di Pasar Inpres II, III dan IV secara gratis kepada para pedagang karena sesuai dengan salah satu butir kesepakatan itu, Pemerintah Kota Padang berkewajiban menyerahkan kios dan los di Pasar Inpres II, III dan IV kepada para pedagang tanpa dipungut biaya.
- b) Pemerintah Kota Padang harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan cara melibatkan partisipasi aktif dari para pedagang dalam penempatan kembali pedagang di Pasar Inpres I dan merumuskan *zoning*, luasan kios dan los dan penempatan kembali para pedagang di Pasar Inpres II, III dan IV. Hal ini penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pedagang terhadap Pemerintah Kota Padang yang selama ini merosot karena kesalahan-kesalahan dalam perumusan kebijakan rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV.
- c) Pemerintah Kota Padang harus meminimalisir hambatan-hambatan sumber daya anggaran dalam merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV dengan memanfaatkan dana pihak ketiga yang tidak menggunakan jangka waktu untuk menghabiskannya, misalnya dana dari pihak swasta.

Referensi

- Ansell, C dan Gash, A. (2002). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 12(4): 543-571.
- Bennett, C. J. dan Howlett, M. (1992). The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change. *Policy Sciences*, 25(3): 275-294.
- Brunner, R. D. (2008). The Policy Scientist of Democracy Revisited. *Policy Sciences*, 41(1): 3-19.
- Bryer, T. A. (2010). Living Democracy in Theory and Practice: Getting Dirty in a Local Government Incorporation Process. *Public Administration and Management*, 15(1): 259-304.
- Carpenter, S. L. dan Kennedy, W. J. D. (1988). *Managing Public Dispute*. San Fransisco: Jossey-Bass.

- Chanley Jr, J. J. (2005). An Analysis of Civic Education Policy-Making in Arizona Using the Advocacy Coalition Framework and Policy Design Theory. *Ph.D Dissertation* in the Arizona State University.
- Dahl, R. A. (1959). Business and Politics: A Critical Appraisal of Political Science. *American Political Science Review*, 53(1): 1-34.
- deLeon, P. (1990). Participatory Policy Analysis: Prescriptions and Precautions. *Asian Journal of Public Administration*, 12: 1-26.
- deLeon, P. (1992). The Democratization of the Policy Sciences. *Public Administration Review*, 52(2): 125-129.
- deLeon, P. (1995). Democratic Values and the Policy Sciences. *American Journal of Political Science*, 39(4): 886-905.
- deLeon, P. (1997). *Democracy and the Policy Sciences*. Albany, New York: State University of New York.
- deLeon, P. dan deLeon, L. (2002). What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 12(4): 467-492.
- Delgado, J. M. (2011). Coalitional Stability in California's Marine Life Protection Act Policy Development Process: An Advocacy Coalition Framework Analysis. *Ph.D Dissertation* at the Department of Public Administration College of Business and Public Management University of La Verne, California.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 1998. "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research". *Strategies of Qualitative Inquiry*. Oaks, California: Sage Publication.
- Dryzek, J. S. (1989). Policy Sciences of Democracy. *Polity*, 22(1): 97-118.
- Dryzek, J. S. dan Torgerson, D. (1993). "Editorial: Democracy and the Policy Sciences: A Progress Report. *Policy Sciences*, 26(3): 127-137.
- Dwidjowijoto, R. N. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Elgin, D. J. dan Weible, C. M. (2013). A Stakeholder Analysis of Colorado Climate and Energy Issues Using Policy Analytical Capacity and the Advocacy Coalition Framework. *Review of Policy Research*, 30(1): 114-133.
- Farr, J., Hacker, J. S. dan Kazee, N. (2006). The Policy Scientist of Democracy: The Dicipline of Harold D. Lasswell. *American Political Science Review*, 100(4): 579-587.

- Francis, D. (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.
- Fung, A. (2006). Democratizing the Policy Process. *The Oxford Handbook of Public Policy*. Editors: Michael Moran, Martin Rein dan Robert E. Goodin. Oxford: Oxford University Press.
- Hayes, E. J. (2008). An Examination of the Advocacy Coalition Framework and the Punctuated Equilibrium Theory: A Case Study of MI Public Act 61 of 2004. *Ph.D Dissertation* at the School of Social Work College of Social Sciences Michigan State University.
- Hupe, P. dan Edwards, A. (2012). The Accountability of Power: Democracy and Governance in Modern Times. *European Political Science Review*, 4(2): 177-194.
- Jenkins-Smith, H. C. dan Sabatier, P. A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14(2): 175-203.
- Knox, C. C. (2010). Competing Paradigms for Analyzing Policy Development in Everglades Restoration: Case Study Using Advocacy Coalition Framework and Habermas' Critical Theory. *Ph.D Dissertation* at the Askew School of Public Administration and Policy College of Social Sciences and Public Policy the Florida State University.
- Leifeld, P. (2013). Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics. *Policy Studies Journal*, 41(1): 169-198.
- Mintrom, M. dan Vergari, S. (1996). Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change. *Policy Studies Journal*, 24(3): 420-434.
- Moffitt, M. L. dan Bordone, R. C. (2005). Perspectives on Dispute Resolution: An Introduction. *The Handbook of Dispute Resolution*. Editors: Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Parsons, W. (2003). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Pruitt, D. G. dan Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roberts, N. (2004). Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. *American Review of Public Administration*, 34(4): 315-353.
- Sabatier, P. A. (1987). Knowledge, Policy-Oriented Learning and Policy Change: An Advocacy Coalition Framework. *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, 8(4): 649-692.

- Sabatier, P. A. (1988). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2/3): 129-168.
- Sabatier, P. A. (1991). Toward Better Theories of the Policy Process. *PS: Political Science and Politics*, 24(2): 147-156.
- Sabatier, P. A. (1998). The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1): 98-130.
- Sato, H. (1999). The Advocacy Coalition Framework and the Policy Process Analysis: The Case of Smoking Control in Japan. *Policy Studies Journal*, 27(1): 28-44.
- Wagle, U. (2000). The Policy Science of Democracy: The Issues of Methodology and Citizen Participation. *Policy Sciences*, 33(2): 207-223.
- Weible, C. M. (2007). An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17: 95-117.